
Lab 2 politik Lvania

Hak-hak politik wanita

nj. Mudigdio

nj. Setiati Surasto

nj. Amir Sjarifudin



Jajasan „Pembaruan"
Djakarta 1960

HN
Indonesia
9

rentjana kulit : Rahmat

W117066
2101
X

KATA PENGANTAR

Memperingati Setengah Abad Hari Wanita Internasional berarti memperingati kemadjuan² serta kemenangan-kemenangan jang telah ditjapai oleh perdjuangan kaum wanita disemua negeri, termasuk Indonesia.

Dalam hal ini kaum wanita Indonesia sudah memperoleh kemadjuan² jang penting, diantaranja tentang hak untuk memilih dan dipilih dalam Dewan² Perwakilan Rakjat. Hal ini sudah dilaksanakan dalam pemilihan-pemilihan umum jang baru lalu.

Akan tetapi disamping kemadjuan tersebut, kita djuga tidak menutup mata terhadap kegandjilan jang masih berlaku, jaitu bahwa masih ada diskriminasi bagi kaum wanita untuk menduduki djabatan² tertentu, misalnja : djabatan sebagai Lurah Desa.

Oleh karena itu kita pandang perlu menerbitkan brosur ini, jang memuat pendapat Fraksi PKI dalam Parlemen sewaktu mensahkan Undang² Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Politik Wanita, ditambah dengan pendapat² Fraksi PKI sewaktu di Konstituante RI.

Kita jakin bahwa dikemudian hari akan dapat ditjapai lebih banjak sukses lagi dalam perdjuangan untuk hak² wanita, chususnja untuk Hak² Politik Wanita dan dihapuskannja segala bentuk diskriminasi.

Departemen Wanita
Comite Central
Partai Komunis Indonesia

Djakarta, Februari 1960

Beri kebebasan demokratis jang seluas-luasnja kepada Rakjat dan organisasi² Rakjat dan batalkan semua undang² dan peraturan² jang membatasi kebebasan patriotik. Djamin hak sama bagi semua warganegara, tanpa pandang asal keturunan, kejakinan politik dan kepertjajaan.

(fasal 12 *Program Tuntutan PKI*)

Diskriminasi dalam hak-hak politik perlu segera diachiri

Nj. Mudigdio



Sebagai seorang wanita jang mengetahui dari dekat penderitaan-penderitaan kaum wanita dan kerapkali mengalami pula sendiri, maka tak perlu kiranja diragukan, bahwa rantjangan Undang-undang tentang „Persetudjuan Konvensi Hak² Politik Kaum Wanita" ini disambut dengan dua belah tangan.

Dikatakan amat berharga, karena ada pengharapan, bahwa dengan diratifikasinja kelak rantjangan Undang-undang ini, dapatlah berachir segala kedjadian dan peristiwa jang gandjil-gandjil, jang setiap hari kita alami dalam masjarakat. Tiap kegandjilan jang pada hakekatnja tidak lain hanja merupakan diskriminasi terhadap kaum wanita.

Dalam djaman jang diberi nama „djaman modern", djaman dimana tiap mulut manusia mempergunakan kata-kata „demokrasi" kadang-kadang kita masih seringkali melihat dan mengalami soal-soal jang tidak „modern" dan tindakan-tindakan jang tidak demokratis.

Tidak modern karena dia sudah ketinggalan djaman, sudah tidak menurut kehendak djaman, tidak mau mengakui rol dari wanita sekarang ini dan hendak menjamakannja sadja dengan djaman purbakala, hendak memaksakan djam berputar kebelakang, tidak demokratis

karena tindakan-tindakan itu mengekang hak-hak dari sebagian dari djumlah machluk jang hidup dalam dunia ini, paling sedikit setengah dari seluruhnja, jaitu kaum wanita.

Hak² dilapangan politik, ekonomi dan sosial dalam sesuatu negara, bertahun-tahun, kadang-kadang berpuluh-puluh tahun hanja mendjadi monopoli pihak laki-laki sadja dan setelah perdjuangan jang sengit dilakukan oleh kaum wanita, baru kemudian dapat dirasakan oleh mereka ?

Tjontoh jang pertama, Konvensi Hak-hak Politik Kaum Wanita ini menurut madjalah resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa keluaran tanggal 18 Agustus 1954 pada waktu tanggal 12 Agustus 1954 baru ditandatangani oleh 38 negara dan menurut bahan jang ada diluar Perserikatan Bangsa-Bangsa maka 76 negara telah melaksanakan hak-hak politik untuk wanita dan masih ada 11 negara dimana kaum wanita tak mempunjainja, antaranja di Saudi Arabia, Afghanistan, Swiss dan lain-lain.

Diantara 76 negara ini ada beberapa jang telah sepenuhnja melaksanakan, tetapi tidak menandatangani konvensinja.

Di Indonesia sendiri, hak-hak politik itu sebenarnja sudah berdjalan. Kita melihat beberapa tahun ini gadis-gadis bekerdja dikantor-kantor Pemerintah, diperusahaan-perusahaan, diseluruh lapangan. Tetapi disamping kesempatan jang terbuka lebar untuk bekerdja, untuk ambil bagian dilapangan pembangunan dan produksi bagi wanita-wanita ini, kita melihat pula kesulitan-kesulitan jang selalu mereka alami.

Diskriminasi selalu mengantjam. Di Kementerian Pertahanan ada pembatasan jang berupa Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat No. 110 jang melarang „seorang wanita jang telah kawin" untuk terus bekerdja ; di Kementerian Kehakiman bagian Djawatan Imigrasi seorang wanita jang telah kawin tidak diperkenan-

kan mendjabat pegawai lagi. Sekarang ini djuga masih begitu.

Ada pula djawatan jang menutup seluruhnja beberapa djabatan umum untuk wanita, umpamanja di Djawatan Kereta Api kita tidak melihat seorangpun kondektur wanita, tidak seorangpun kepala stasiun wanita. Mengapa gerangan tidak ? Kalau dilihat rekan-rekan laki-laki mereka jang mendjadi kondektur dan kepala stasiun, kiranja djuga wanita-wanita itu bisa mendjalankan pekerdjaan itu, ketjakapannja tak djauh berbeda atau kurang.

Apabila umpamanja seorang wanita djadi kepala stasiun, keluar masuknja orang-orang kestasiun akan lebih teratur, stasiun-stasiun tidak akan sekotor sekarang ini. Kalau dia mendjadi kondektur pasti kebersihan dalam wagon-wagon Djawatan Kereta Api akan terdjamin, hygiene akan terpelihara, penumpang tak usah berebutan tempat duduk, karena sifat wanita adalah pembersih dan tjinta keindahan. Ini terbukti dalam bus-bus dan trem-trem di Eropa, Wina, di Roma sebagian besar kondektur-kondektur bus itu adalah wanita, bus-busnja rapih-rapih, tetapi mengapa di Indonesia tidak kita djumpai kondektur-kondektur wanita seperti diluar negeri ? Apakah dasarnja diskriminasi dan hanja diskriminasi bersendikan perbedaan sex ? Perhatikanlah advertensi-advertensi dari Angkatan Udara, Angkatan Darat, Kepolisian dan sebagainja, pernahkah ada panggilan bagi laki-laki maupun wanita untuk dididik mendjadi radiograaf, ahli-ahli menggambar, pradjurit, inspektur ? Tidak, panggilan hanja ditudjukan pada „orang-orang laki-laki berumur....., beridjazah....., berbadan sehat, mempunjai surat keterangan tentang kelakuan baik dan seterusnja. Apa kedjadian-kedjadian demikian ini tidak bertentangan dengan pasal III Undang-undang ini, dan terutama bertentangan dengan Undang-undang Dasar Sementara pasal 23 itu ?

Tjontoh ketiga : Dalam bulan Djuni 1957 seorang

wanita bernama Sri Darningsih turut dalam pemilihan kepala desa didesa Buloh, Kabupaten Blora. Dia mendapatkan suara jang paling baik, meninggalkan djauh dibelakang tjalon-tjalon laki-laki. Dengan demikian maka wanita itu terpilih mendjadi kepala desa. Hasil pemilihan ini disampaikan kepada Saudara Residen dan Saudara Gubernur Djawa Tengah, setelah berbulan-bulan menanti penetapan maka didapat djawaban bahwa dia tidak dapat ditetapkan mendjabat kepala desa, karena ada "I.G.O." 1907.

Mendengar keputusan ini, maka di Semarang delegasi dari wanita menghadap Saudara Gubernur, di Djakarta delegasi jang demikian djuga menghadap Saudara Menteri Dalam Negeri untuk memprotes keputusan itu dan meminta keadilan, menuntut dilaksanakannja Hak-hak Azasi Manusia jang tertjantum dalam Undang-undang Dasar Sementara.

Walaupun diakui, bahwa seharusnja dalam negara merdeka peristiwa demikian ini tidak boleh terdjadi, bahwa hal itu merupakan ketidakadilan, namun apa dapat dibuat, "I.G.O." ada, dan karena itu „wanita tidak diperbolehkan mendjabat kepala desa". Achirnja didjandjikan untuk selekas mungkin merubah "I.G.O." jang chianat itu.

Setelah beberapa bulan berlangsung, untuk mengisi kekosongan jang terdapat didesa Buloh, maka pada kira-kira bulan April 1958 diadakan kembali pemilihan umum kepala desa.

Sri Darningsih turut djuga ditjalonkan dan diantara tjalon^{2} tadi d^{i}a keluar sekali lagi dengan suara terbanjak, berarti Sri Darningsih terpilih kembali. Hal ini telah lebih-kurang 2 bulan berdjalan dan sampai saat ini belum djuga ada keputusan dari fihak atasan. Mestinja ini karena "I.G.O."-nja masih tetap ada, karena antara waktu penolakan lurah wanita pertama sampai pada terpilihnja kedua kalinja "I.G.O." belum diapa-apakan. Dalam mengupas hak-hak politik wanita di-

mana soal Sri Darningsih ini belum selesai dan pasal I, II dan III djustru sesuai sekali untuk tjontoh pelaksanaannja, maka tepatlah djika pasal-pasal diskriminasi dalam "I.G.O." itu dihapus dan mengadjukannja ke Dewan Perwakilan Rakjat untuk disahkan. Dengan demikian maka dilaksanakan pulalah pasal 35 Undang-undang Dasar Sementara jang berbunji :

„Kemauan Rakjat adalah dasar kekuasaan penguasa ; kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan berkala jang djudjur dan jang dilakukan menurut hak pilih bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara jang rahasia ataupun menurut tjara jang djuga mendjamin kebebasan mengeluarkan suara".

Pasal ini tjukup kuat bagi Pemerintah untuk menghapuskan "I.G.O." dan mengachiri kesulitan-kesulitan jang timbul oleh karenanja. Sri Darningsih tahan udji, Rakjatnja setia pada pilihannja pertama, adalah kehendak, kemauan Rakjat desa Buloh bahwa dia mendjadi kepala desa, satu djabatan umum, seperti ditjantumkan dalam pasal II dan III Undang-undang ini.

Hari ini Sri Darningsih, terpilih mendjadi lurah, tapi menemui kesulitan "I.G.O.", besok pagi Siti, lusa Umi dan demikianlah berturut-turut, karena roda zaman akan berputar terus wanita akan terus menudju emansipasinja.

Berbitjara tentang pemilihan lurah, djuga dilapangan ini masih ada bermatjam-matjam tjara, jang djuga merupakan diskriminasi. Disalahsatu model desa, jaitu desa Kalipuro, Banjuwangi, dalam pemilihan kepala desa, jang mempunjai hak pilih hanja „orang-orang laki-laki kepala somah".

Wanita tidak turut memilih. Tetapi waktu pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakjat mereka ikut memilih. Ketika ditanjakan mengapa ada perbedaan, didjawab bahwa pemilihan lurah sedjak dahulu(djaman pendjadjahan, dus "I.G.O." lagi) memang begitu. Adapun pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakjat

dan Konstituante itu kan baru selama kemerdekaan, aturan baru. Ini adalah kenjataan jang tak terbantah, jang bisa bikin marah orang kalau kurang sabar. Untunglah, didesa lain, desa Pesanggrahan, tiap orang laki-laki dan wanita jang memenuhi sjarat pemilihan seperti tertjantum menurut Undang-undang No. 7 tahun 1953 dalam pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante, berhak memilih.

Bagaimana dalam satu kabupaten bisa berlaku dua sistim pemilihan, kita tak mengerti, ketjuali kalau hanja oleh karena perundang-undangan kita masih kusut, karena berbagai Undang-undang kolonial masih berlaku. Hendaknja Pemerintah mempertimbangkan dan hendaknja segera diachiri keadaan ini, jang merupakan diskriminasi dalam hak-hak politik wanita dan laki-laki, dan antara laki-laki dari satu desa dan laki-laki dari lain desa (kepala somah dan perseorangan). Hal-hal demikian bukanlah jang dimaksudkan dalam rantjangan Undang-undang tsb.

Dalam mukaddimah telah dinjatakan terang-terang bahwa maksudnja adalah untuk mendjalankan azas persamaan-persamaan hak bagi pria dan wanita, bagi tiap orang tanpa memandang asal keturunan, kepertjajaan dan djenis kelamin.

Azas ini hendaknja dapat didjalankan sebaik-baiknja oleh Pemerintah Indonesia dan dimana masih ada kekurangan-kekurangan seperti diatas, seharusnja Pemerintah akan bertindak untuk mentjukupinja.

Pengertian dalam hal meratifikasi suatu konvensi internasional ialah bahwa negara kita dapat melaksanakan azas-azas jang termaktub didalamnja, dapat menjesuaikan perundang-perundangan kita dalam hal-hal tersebut dengan peraturan-peraturan konvensi itu. Tentu tak akan ada gunanja bila satu dengan lain masih bertentangan.

Ketjuali Konvensi Hak-hak Politik bagi wanita, banjak pula konvensi jang lain, jang sudah disahkan oleh

Perserikatan Bangsa-bangsa jang tidak kurang pentingnja bagi kaum wanita. Badan-badan chusus Perserikatan Bangsa-bangsa (Specialized Agencies) terutama International Labour Organizationnja telah membuat berbagai konvensi jang berupa djaminan-djaminan bagi kaum wanita jang bekerdja tambah hari makin meningkat, bahwa tenaga kerdja mereka adalah berharga untuk kemadjuan satu masjarakat jang modern, dengan tidak membeda-bedakan, apakah tenaga itu berupa tenaga intelek seperti dokter, ahli hukum atau lain-lainnja seperti pegawai-pegawai didjawatan-djawatan, pemetik teh dan kopi diperkebunan, tenaga pengetam disawah. Ja kadang-kadang, dibeberapa lapangan, tenaga wanita adalah tenaga jang menentukan (produksi batik, pertenunan, produksi sawah). Alangkah baiknja umpamanja kalau Pemerintah Indonesia (Kabinet Karja), setelah begitu progresif untuk memelopori diratifikasinja Konvensi 100 dan Konvensi Hak-hak Politik Wanita ini, memang dalam sedjarah Parlemen Indonesia baru selama Kabinet inilah konvensi^2 internasional mengenai hak^2 wanita diadjukan, mengadjukan konvensi-konvensi lainnja, umpamanja Konvensi 103 jang dapat dipakai sebagai dasar untuk djaminan kepentingan ibu (keibuan), recommendation 95 jang berkenaan dengan konvensi itu. Karena kegembiraan dan ketentraman bekerdja akan tertjapai dengan djaminan-djaminan hak wanita. Ada baiknja kalau dari masing-masing Kementerian atas andjuran Kementerian Luar Negeri memanggil serikat^2 buruhnja, untuk mempeladjari dan kemudian memilih konvensi-konvensi mana dari masing-masing kementerian. Kementerian Perburuhan konvensi-konvensi jang dibuat International Labour Organization. Kementerian Kesehatan aturan-aturan dari (World Health Organization) dan lain-lain kementerian jang penting bagi pelaksanaan dan djaminan-djaminan hak-hak wanita, agar dapat diadjukan dalam Parlemen.

Persetudjuan Konvensi Hak-hak Politik Kaum Wa-

nita adalah suatu dokumen jang amat penting dan amat berharga untuk pelaksanaan dan djaminan hak-hak wanita. Oleh karena itu wanita Indonesia mengharapkan agar ratifikasi terhadap konvensi tersebut selekas mungkin disampaikan ke Perserikatan Bangsa-bangsa.

☆

Kongres Perempuan Indonesia (1928)



Saja mengadjak segenap wanita Indonesia dan segenap rakjat Indonesia mentjintai dan mengedjar sosialisme itu (via revolusi Nasional) oleh karena fikiran saja berkata, h a n j a dalam sosialismelah wanita Indonesia dan rakjat Indonesia dapat kebahagiaan, bahkan seluruh wanita sedunia dan seluruh kemanusiaan sedunia pula.

(Bung Karno)

UNDANG-UNDANG No. 68 TAHUN 1958
TENTANG
PERSETUDJUAN KONVENSI HAK-HAK POLITIK KAUM WANITA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu konvensi hak-hak politik kaum wanita disetudjui dengan Undang-undang ;

Mengingat : a. pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;
b. pasal IV sub-sub Konvensi tersebut ;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat ;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUDJUAN KONVENSI HAK-HAK POLITIK KAUM WANITA.

Pasal 1.

Konvensi hak-hak politik kaum wanita tertanggal 20 Desember 1952 jang salinannja dilampirkan pada Undang-undang ini, bersama ini disetudjui dengan mengadakan reservations/pengetjualian sebagai tersebut pada pasal 2.

Pasal 2.

Kalimat terachir pasal VII dan pasal IX seluruhnja dari Konvensi hak-hak politik kaum wanita dianggap sebagai tidak berlaku bagi Indonesia.

Pasal 3.

Konvensi tersebut diatas mulai berlaku pada hari ke-90 sesudah tanggal penempatan surat ratifikasi pada Sekretariat Perserikatan bangsa2.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta,
pada tanggal 17 Djuli 1958.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.,

SUKARNO

MENTERI LUAR NEGERI,

ttd.,

SUBANDRIO

Diundangkan
pada tanggal 28 Agustus 1958,

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.,

G.A. MAENGKOM

LEMBARAN NEGARA No. 119 TAHUN 1958.

MEMORI PENDJELASAN MENGENAI USUL UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUDJUAN KONVENSI HAK-HAK POLITIK KAUM WANITA

A. PENDJELASAN UMUM.

Undang-undang Dasar Sementara R.I. mendjamin hak-hak jang sama dengan kaum pria bagi kaum wanita dalam segala lapangan. Wanita Indonesia pada waktu sekarang mendapat kesempatan untuk menduduki djabatan apapun sadja dalam segala aparat-aparat pemerintah. Djuga hak untuk memilih dan dipilih kaum wanita dalam semua badan-badan jang dipilih umum telah didjalankan dan telah terbukti dan oleh sebab itu Pemerintah R.I. dapat menjetudjui maksud dan tudjuan Konvensi Hak-hak Politik Kaum Wanita jang pada dasarnja sedjalan dengan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

B. PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I. : Wanita akan mempunjai hak untuk memberikan suaranja dalam semua pemilihan-pemilihan dengan sjarat-sjarat jang sama dengan pria, tanpa suatu diskriminasi.

Pendjelasan : Pasal ini sesuai dengan Pasal 23 ajat 1, UUDS RI, jang menjatakan : „Setiap warganegara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan bebas menurut tjara jang ditentukan oleh Undang-undang".

Pasal II. : Wanita akan dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua pemilihan-pemilihan dengan sjarat-sjarat jang sama dengan pria, tanpa suatu diskriminasi.

Pendjelasan : Pasal ini sesuai dengan Pasal 23 ajat 1, UUDS RI, jang menjatakan : „Jang boleh mendjadi anggota DPR ialah warga negara jang telah berusia 25 tahun dan bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak pilih ataupun orang jang haknja untuk dipilih telah ditjabut".

Pasal III. : Wanita akan mempunjai hak untuk mentjabut djabatan umum dan mendjalankan semua tugas-tugas umum, jang didirikan oleh hukum nasional, dengan sjarat-sjarat sama dengan pria tanpa diskriminasi.

Pendjelasan : Pasal ini sesuai dengan Pasal 23 ajat 2 dari UUDS RI, jang menjatakan : „Setiap warganegara dapat diangkat dalam tiap-tiap djabatan Pemerintah".

Pasal IV. : Tidak memerlukan pendjelasan.
Pasal V. : Tidak memerlukan pendjelasan.
Pasal VI. : Tidak memerlukan pendjelasan.
Pasal VII. : Indonesia berpendirian bahwa Konvensi tetap berlaku diantara Indonesia dan para peserta jang telah meratifisir, ketjuali mengenai pasal atau pada bagian dimana di-

njatakan reservation oleh Indonesia atau oleh sesuatu Negara.
Dengan demikian Indonesia membuat reservation terhadap kalimat terachir dari pasal VII.

Pasal VIII. : Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal IX. : Indonesia berpendirian bahwa persengketaan jang timbul tentang interpretasi atau pelaksanaan dari Konvensi ini diantara para anggota harus ditindjau sendiri-sendiri dan terserah kepada anggota-anggota jang bersangkutan untuk setiap kali menjatakan bersedia tidaknja soal tersebut diputuskan oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice).

Pasal X. : Tidak memerlukan pendjelasan.

Pasal XI. : Tidak memerlukan pendjelasan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 1653.



KONVENSI MENGENAI HAK-HAK POLITIK KAUM WANITA

Pihak^2 peserta.

Berhasrat mendjalankan azas persamaan hak^2 bagi pria dan wanita seperti tertjantum didalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Mengakui bahwa setiap orang mempunjai hak untuk ikut serta dalam pemerintahan negaranja setjara langsung atau melalui wakil^2 jang dipilih dengan tjara bebas, dan mempunjai hak sama untuk ikut serta dalam djabatan umum dinegaranja tanpa pengetjualian, dan berhasrat untuk menjatakan kedudukan bagi laki^2 dan wanita dalam mengetjap dan mendjalankan hak^2 politik, selaras dengan ketentuan^2 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pernjataan umum tentang hak^2 azasi Manusia.

Memutuskan untuk menjimpulkan suatu Konvensi untuk tudjuan ini,

Dengan ini menjetudjui sebagai termaktub dibelakang ini :

Pasal 1.

Wanita akan mempunjai hak untuk memberikan suaranja dalam semua pemilihan^2 dengan sjarat^2 sama dengan pria, tanpa suatu diskriminasi.

Pasal 2.

Wanita akan dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua badan^2 pilihan umum, jang didirikan oleh hukum nasional, dengan sjarat^2 sama dengan pria tanpa suatu diskriminasi.

Pasal 3.

Wanita akan mempunjai hak untuk mendapat djabatan umum dan mendjalankan semua tugas^2 umum, jang didirikan oleh hukum nasional dengan sjarat^2 sama dengan pria, tanpa suatu diskriminasi.

Pasal 4.

1. Konvensi ini akan terbuka untuk penandatanganan atas nama setiap anggota PBB dan djuga atas nama setiap negara lain terhadap mana undangan telah diberikan oleh General Assembly (Sidang Umum).
2. Konvensi ini akan diratifikasi dan alat/ratifikasi akan disimpan oleh Sekretaris-djenderal PBB.

Pasal 5.

1. Konvensi ini akan terbuka untuk accession (ikut serta) bagi semua negara jang dimaksud dalam paragrap 1 dari Pasal 4.
2. Accession ini akan berlaku dengan disimpannja „Instrument of accession" oleh Sekretaris-djenderal PBB.

Pasal 6.

1. Konvensi ini akan mulai berlaku pada hari jang kesembilan puluh sesudah tanggal penjimpanan „instrument of ratification or accession", jang ke-enam.
2. Untuk setiap negara jang meratifisir atau jang ikut serta dalam Konvensi sesudah penjimpanan „instrument of ratification or accession" jang ke-enam, Konvensi akan mulai berlaku pada hari jang kesembilan puluh sesudah penjimpanan „instrument of ratification or accession" oleh negara jang bersangkutan.

Pasal 7.

(Bilamana) sesuatu negara mengemukakan suatu reservation terhadap suatu dari Pasal^2 Konvensi ini pada waktu penandatanganan, ratificasi atau accession, Sek-

retaris-djenderal akan mengumumkan teks dari reservation itu kepada semua negara jang telah atau akan mendjadi peserta dari Konvensi ini. Setiap negara jang berkeberatan terhadap reservation padat, didalam djangka waktu sembilan puluh hari sesudah tanggal pengumuman jang tersebut diatas (atau pada tanggal djadi peserta pada Konvensi), memberitahukan kepada Sekretaris-Djenderal bahwa ia tidak menerimanja. Dalam hal jang demikian, Konvensi tidak akan berlaku antara negara itu dengan negara jang mengadakan reservation.

Pasal 8.

1. Setiap negara dapat membatalkan Konvensi ini dengan pemberitahuan setjara tertulis kepada Sekretaris Djenderal PBB. Pembatalan akan berlaku satu tahun sesudah tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Djenderal.
2. Konvensi ini tidak akan mempunjai kekuatan lagi mulai tanggal djika pembatalan jang mengurangi djumlah peserta kurang dari enam mulai berlaku.

Pasal 9.

Setiap persengketaan jang mungkin timbul antara tiap dua atau lebih negara² peserta mengenai tafsiran atau pelaksanaan dari Konvensi ini, jang tidak diselesaikan dalam perundingan, atas permintaan dari salah satu dari peserta² jang bersengketa akan diteruskan kepada International Court of Justice untuk diputuskan, ketjuali djika mereka setudju kepada tjara penjelesaian jang lain.

Pasal 10.

Sekretaris Djenderal PBB akan memberitahukan kepada semua anggota PBB dan negara² bukan anggota jang disebut dalam paragrap 1 dari Pasal 4 dari Konvensi ini seperti berikut :

(a) Penandatanganan² dan instrument of ratifications jang diterima sesuai dengan Pasal 4.
(b) Instruments of accession jang diterima sesuai dengan Pasal 5.
(c) Tanggal mulai berlakunja Konvensi ini sesuai dengan Pasal 6.
(d) Pengumuman² dan pemberitahuan² jang diterima sesuai dengan Pasal 7.
(e) Pemberitahuan² pembatalan jang diterima sesuai dengan paragrap 1 dari pasal 8.
(f) Pembatalan sesuai dengan paragrap 2 dari Pasal 8.

Pasal 11.

1. Konvensi ini, jang naskah²nja dibuat dalam bahasa² Tionghoa, Inggris, Rusia dan Spanjol akan sama sjahnja, akan disimpan dalam arsip PBB.
2. Sekretaris Djenderal PBB akan meneruskan salinan jang sudah didjamin keasliannja kepada semua anggota PBB dan kepada negara² bukan anggota sebagai termaktub dalam paragrap 1 dari Pasal 4.

☆

Hapuskan semua undang² dan peraturan² kolonial seperti "IGO", "IGOB", dll, dan demokrasikan pemerintah dzsa dengan djalan mengadakan pemilihan kepala desa setjara periodik dan membentuk otonomi daerah swatantra tingkat III.

(fasal 10 *Program Tuntutan PKI*)

Soal Kepala Desa Wanita Buloh

PERTANJAAN anggota² Nj. Mudigdio, S. Suharti dan Peris Pardede tentang penolakan Wedana Sumpjuh mengenai pemilihan Kepala Desa Wanita (tanggal 29 Agustus 1957 No. 12663/DPR-RI/'57)



Berdasarkan berita "ANTARA" tertanggal 27-8-'57, jang pada pokoknja menerangkan, bahwa fihak Gubernur Djawa Tengah membenarkan adanja keterangan tentang penolakan fihak Wedana Sumpjuh tentang pemilihan Kepala Desa Wanita disana ; keputusan Wedana itu dikuatkan oleh fihak Residen Banjumas, tapi baru² ini putusan itu dituntut untuk ditjabut, (lengkapnja lihat lampiran), maka dengan ini, kami mengadjukan pertanjaan² seperti dibawah ini, dengan pengharapan agar Pemerintah se-tjepat²nja memberikan djawaban setjara lisan dimuka rapat pleno D.P.R.

1. Benarkah berita "Antara" tersebut jang menjatakan, bahwa Wedana Sumpjuh (Banjumas) telah menolak atau tidak mengesahkan pilihan Kepala Desa Wanita didalam wilajahnja ?
2. Kalau itu benar, apakah Pemerintah sependapat dengan penanja, bahwa tindakan untuk tidak mengesahkan suatu pilihan karena hanja ia seorang wanita, bertentangan dengan : 1. hak azasi manusia berdasar persamaan hak, 2. dengan ketentuan pasal 23 U.U.D.S. jang berbunji sbb. :

„1. Setiap warga-negara berhak turut-serta dalam Pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil-wakil jang dipilih dengan bebas menurut tjara jang ditentukan oleh Undang-undang.
2. Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tiap² djabatan Pemerintah. Orang asing boleh diangkat dalam djabatan² Pemerintah menurut aturan² jang ditetapkan oleh Undang-undang".

3. Apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa jang dimaksud oleh pasal 23 Undang-undang Dasar Sementara tersebut diatas dengan kata² „setiap warga-negara" adalah warganegara lelaki maupun perempuan ?
4. Apakah Pemerintah bisa menundjukkan kepada kami ketentuan suatu Peraturan Pemerintah atau Undang-undang jang melarang seorang wanita mendjabat kedudukan Lurah ? Apakah tindakan Pemerintah terhadap perbuatan jang begitu tertjela dari Wedana Sumpjuh itu ?
5. Menurut berita "Antara" itu alasan jang dipakai adalah peraturan² Hindia Belanda dahulu. Mengenai ini kami bertanja, apakah Pemerintah tidak sependapat dengan penanja, bahwa isi Peraturan² pemilihan Lurah buatan Hindia Belanda (Desahoofd-verkiezings-Ordonanntie Stbl. 1907 No. 212 dengan segala usaha² dan tambahan²nja menurut Stbl. 1912 No. 567, 1913 No. 712, 1917 No. 497, 1918 No. 277, 1925 No. 378, 1928 No. 295 dan 1929 No. 227) *sudah tidak sesuai lagi* dan perlu segera diganti sebagai peraturan jang berlaku dinegara jang merdeka ?
6. Apakah Pemerintah sependapat dengan penanja, bahwa kekuasaan pengesahan pemilihan Lurah menurut Peraturan² Hindia Belanda tersebut diatas perlu dipindahkan dari tangan Residen ketangan D.P.D. Kabupaten ?

Penolakan pemilihan Kepala Desa Wanita berlawanan dengan UU Dasar R.I. ajat 2-4-26-39.

Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) Djawa Tengah jang pada tanggal 24 dan 25-8 melangsungkan konperensi kerdjanja di Semarang selain membitjarakan soal² konsolidasi organisasi kedalam, djuga telah membitjarakan persoalan jang hangat baru² ini mengenai hasil² pemilihan Kepala Desa jang dimenangkan oleh penduduk wanita anggota Gerwani. Dengan terpilihnja Sri Darningsih anggota Gerwani sebagai Kepala Desa Buloh wilajah Kunduran Blora, Gerwani Djawa Tengah berpendapat, membuktikan kenjataan, bahwa wanita djuga mendapat kepertjajaan untuk memikul tanggung-djawab jang tidak ringan. Menurut keterangan, Sri Darningsih jang terpilih sebagai Kepala Desa Buloh tersebut telah pula memperoleh surat pengangkatan (beslit) dengan mendapat bengkok 2 ha, 1 ha diantaranja diserahkan kepada usaha² pembangunan desa.

Selandjutnja pihak Dewan Pimpinan Daerah Gerwani Djawa Tengah menjatakan penjesalannja terhadap putusan jang wadjib di Sumpjuh (Banjumas) jang telah mengambil putusan menolak atau tidak mengesahkan pilihan Kepala Desa Wanita didalam wilajah Kawedanan Sumpjuh. Selandjutnja Gerwani akan membawa peristiwa tersebut kesidang Parlemen.

Menurut keterangan jang diperoleh "Antara" dari pihak Gubernuran Djawa Tengah mengenai hasil pemilihan Kepala Desa di Buloh (Blora) tersebut serta pemberian surat pengangkatan (beslit), sedang diurus untuk diperoleh keterangan²nja resmi. Diterangkan selandjutnja, bahwa pengangkatan Kepala Desa, menurut peraturan ditetapkan oleh Residen jang bersangkutan dan biasanja paling tjepat sebulan sesudah pemilihan.

Selandjutnja pihak Gubernuran Djawa Tengah membenarkan adanja keterangan tentang penolakan pihak

Wedana di Sumpjuh tentang pemilihan Kepala Desa Wanita disana ; keputusan Wedana itu dikuatkan oleh pihak Residen Banjumas, tapi baru² ini putusan itu dituntut untuk ditjabut. Menurut pihak Gubernuran, sebaiknja soal itu dituntut melalui Parlemen.

Peraturan Pemilihan Kepala Desa jang masih berlaku itu adalah menurut Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1907 No. 212. Sedang Peraturan tentang penguasaan dan keperluan rumah-tangga desa atau IGO (Inlandse Gemeente Ordonnantie) adalah tersebut dalam Lembaran Negara 1906 No. 83. „Antara"

☆

Pendapat Menteri Dalam Negeri Sanusi Hardjadinata tentang Kepala Desa Wanita

1. dan 2. Menurut pemeriksaan, berita "Antara" jang mengabarkan, bahwa Wedana Sumpjuh (Banjumas) telah menolak atau tidak mengesahkan pilihan Kepala Desa Wanita didalam wilajahnja, ternjata tidak benar.

3. Kami sependapat dengan anggota² D.P.R. Nj. Mudigdio dkk., bahwa jang dimaksud oleh pasal 23 Undang-undang Dasar Sementara dengan kata² „setiap warganegara" adalah warganegara R.I. lelaki maupun perempuan.

4. Undang-undang jang melarang seorang wanita mendjabat kedudukan Lurah, ialah Undang-undang tentang pemilihan Lurah, Stbl. 1907 No. 212 pasal 5.

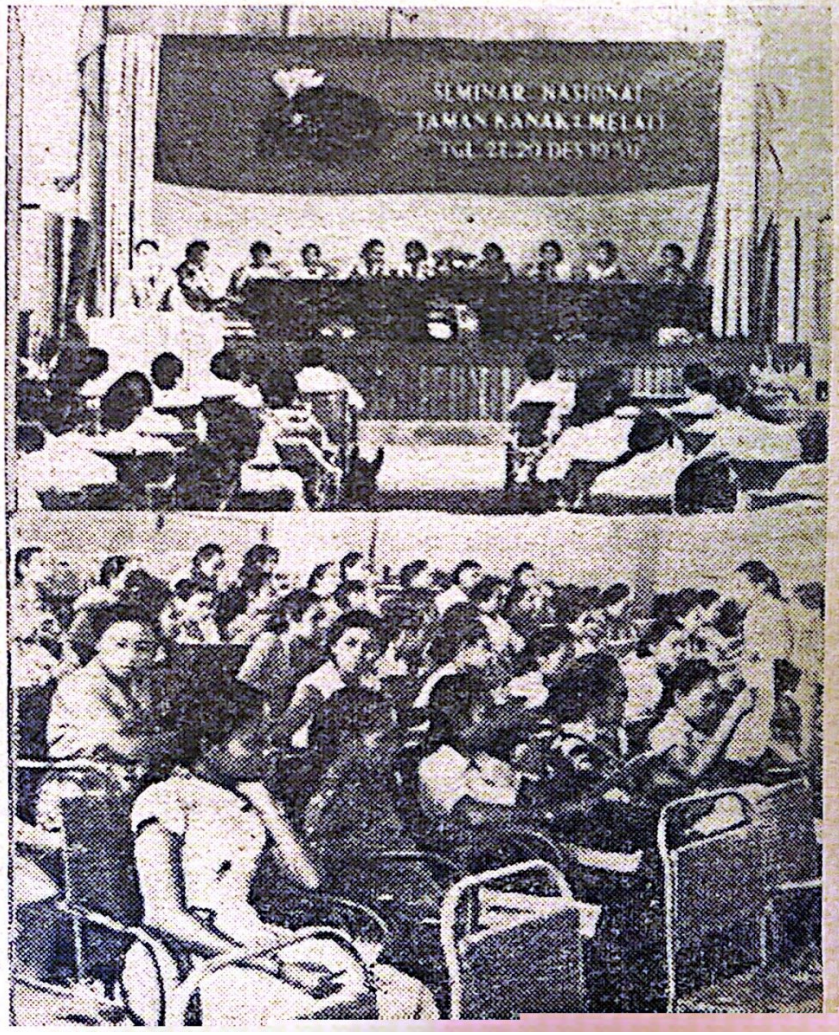
5. Kami sependapat dengan anggota² D.P.R. tersebut diatas, bahwa Undang-undang tentang pemilihan Lurah buatan Hindia Belanda (Desahoofdverkiezings-Ordonnantie Stbl. 1907 No. 212 dengan segala perubahan² dan tambahan²nja menurut Stbl. 1912 No. 567, 1913 No. 712, 1917 No. 497, 1918 No. 277, 1925 No. 378, 1928 No. 295 dan 1929 No. 277) sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan Negara perubahan dari

peraturan^2 kedesaan.

6. Berhubung kedesaan kini masih ada dalam pengurusan Pemerintah Pusat, kami berpendapat, bahwa selama kekuasaan itu belum diserahkan kepada Daerah dan peraturan tentang pemilihan Kepala Desa belum diubah, pengesahan pemilihan Kepala Desa tetap dilakukan oleh Residen.

Hapuskan pendidikan kolonial dan laksanakan pendidikan nasional jang ilmiah dan kerakjatan .....

(fasal 43 *Program Tuntutan PKI*)



Hak Azasi Warganegara Dalam Undang^2 Dasar

Nj. Setiati Surasto



Salah satu soal jang sangat penting untuk dimasukkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia adalah masalah hak^2 kebebasan dan kewadjiban azasi *warganegara*.

Undang^2 Dasar dari banjak negara disamping mengatur soal-soal organisasi negara lazimnja mentjantumkan djuga ketentuan^2 mengenai hak^2 azasi manusia.

Meskipun di-negara^2 kapitalis dalam prakteknja hak-hak azasi hanja dapat dinikmati oleh segolongan ketjil manusia sadja, akan tetapi bagaimanapun djuga, ditjantumkannja pasal-pasal mengenai hak azasi dalam Undang^2 Dasar sesuatu negara, menggambarkan hasrat Rakjat negara itu supaja ada djaminan mengenai hak^2 azasi. Kita melihat dalam Undang^2 Dasar Perantjis jang dibuat setelah berachirnja perdjoangan Rakjat Perantjis dalam menentang dan merobohkan pemerintahan feodal dan menggantikannja dengan Pemerintahan Republik. Kita melihat didalamnja hasrat dari Rakjat jang mentjari penjelesaian dari pendjadjahan, penindasan, pemerasan serta tindakan^2 se-wenang^2 dari segolongan manusia terhadap sesamanja.

Djika kita menindjau perdjoangan daripada Rakjat Indonesia sedjak zaman pendjadjahan Belanda, dan

agressi serta pendudukan fasis Djepang, kita mentjatat dan dapat mendjumlah pengalaman^2 mengenai pengekangan hak^2 azasi manusia jang tidak sedikit.

Kita mengenal peraturan^2 pemerintah pendjadjahan Belanda dengan artikel^2 dalam strafwetboeknja jang sangat terkenal djahatnja sebagai artikel karet, artikel no. 153, 161 bis dan ter, dan sebagainja. Artikel^2 itu semua isinja larangan atau pengekangan mengenai berapat, berserikat, berbitjara, mengemukakan pendapat dll. Kita mengenal peraturan^2 mengenai penggunaan tenaga buruh setjara se-wenang^2. Kita mengenal punale sanctie jang menjamakan kaum buruh dengan ternak, bahkan lebih rendah daripada itu. Kita mengenal perlakuan terhadap buruh wanita perkebunan, dimana pengusaha^2 Belanda menggunakan tenaga buruh wanita tidak sadja sebagai tenaga jang menghasilkan produksi, jang memberi keuntungan materi jang berlimpah-limpah, djuga digunakan sebagai objek melampiaskan napsu kebinatangannja dengan tidak adanja peraturan^2 jang memberi perlindungan atau membela nasib warganegara wanita ini. Kita mengenal tiadanja kesempatan kerdja jang lajak, penghasilan atau upah jang mentjukupi. Kita mengenal hidup sebenggòl sehari. Kita mengenal penggunaan tenaga kerdja dikalangan anak^2 dibawah umur dengan sjarat^2 kerdja jang diluar batas perikemanusiaan. Perdjoangan Rakjat Indonesia dengan gerakan nasional jang pertama merupakan usaha^2 untuk melepaskan diri dari belenggu pendjadjahan, penindasan dan pengekangan. Dalam perdjoangan Rakjat ini ikut serta kaum wanita.

Perdjoangan Kartini dalam melepaskan diri dari belenggu adat-istiadat kolot jang mengekang kebebasan wanita sebagai gadis, istri dan ibu, dari belenggu feodalisme djuga merupakan usaha^2 jang sangat berharga dalam mendapatkan hak^2 azasi manusia wanita.

Perdjoangan dan gerakan Rakjat Indonesia laki^2 dan wanita dalam menuntut kebebasan dan hak^2 azasi, mentjapai puntjaknja dengan meletusnja revolusi 17 Agustus 1945.

Sudah sewadjarnjalah djika sesuatu bangsa jang memperoleh hasil perdjoangannja dalam melepaskan diri dari belenggu penindasan dan pendjadjahan, merumuskan dan mentjantumkan ketentuan^2 mengenai hak^2 kebebasan dan azasi manusia dalam Undang^2 Dasar negaranja.

Demikian pula dalam Undang^2 Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ditjantumkan hak azasi warganegara.

Berdasarkan hal^2 tersebut diatas, maka salah satu soal pokok jang penting untuk dimasukkan dalam Undang^2 Dasar Republik Indonesia adalah *hak^2 dan kebebasan serta kewadjiban azasi warganegara.*

Berhubung dengan kedudukan dan keadaan wanita Indonesia jang masih besar terpengaruh oleh sisa^2 feodalisme jang dalam hakekatnja mengekang hak^2 dan kebebasan wanita dan menempatkan wanita pada kedudukan jang lebih rendah dari laki^2, maka dalam Undang^2 Dasar mengenai hak^2 dan kebebasan azasi warganegara ditjantumkan pula pasal jang mendjamin hak sama bagi wanita, sehingga terdjamin pula pelaksanaan daripada hak^2 itu dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan adanja hak^2 serta kebebasan dan kewadjiban azasi warganegara dalam Undang^2 Dasar, maka akan dapat terdjamin hak^2 dan kebebasan warganegara Indonesia, hak sama antara wanita dan prija, hak untuk hidup lajak, untuk mendapat perlindungan dan pekerdjaan, untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, untuk berdemonstrasi, hak untuk mogok bagi kaum buruh, disamping kewadjiban azasi jang lazim dipikulkan kepada setiap warganegara untuk kepentingan dan keselamatan masjarakat dan negara.

Demikianlah mengenai hak^2 serta kebebasan dan kewadjiban azasi warganegara.

Bagi penduduk bukan warganegara, perlu ditjantumkan pasal^2 tersendiri, jang mengatur ketentuan^2 dan

perlakuan² terhadapnja sesuai dengan djiwa dari Pernjataan Umum tentang Hak² Manusia jang diterima dan diproklamirkan oleh Madjelis Besar dari Perserikatan Bangsa² pada tanggal 10 Desember 1948, dengan tidak mengurangi kepentingan dan kedaulatan Rakjat dan Bangsa Indonesia.

Pemandangan didepan suatu Toko Sandang-Pangan



Majoritet jang sangat terbesar dari massa wanita adalah jang paling tertindas hidupnja sebagai akibat daripada krisis ekonomi jang terusmenerus menjengkeram negeri kita. Mereka adalah korban pertama daripada meradjalelanja penganggur-an, kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan ekonomi dan sosial dinegeri kita. (D.N. Aidit)

Hak² Wanita dan Anak²

Nj. Amir Sjarifudin



Djika kita memperhatikan sedjarah perkembangan masjarakat dan sedjarah perkembangan dunia, maka kita melihat bagaimana kedudukan wanita djuga terpengaruhi oleh ber-matjam² bentuk masjarakat itu. Dalam masjarakat djadjahan kedudukan wanita lebih rendah dari kaum laki². Dalam masjarakat jang mempunjai dasar² demokrasi kaum wanita menempati kedudukan jang lebih madju, di negara Sosialis kedudukan wanita terdjamin disegala lapangan.

Kaum wanita Indonesia pada waktu ini dalam batas² tertentu telah mempunjai kedudukan jang sama dengan laki², tetapi masih banjak terikat pada adat-istiadat dan pengaruh dari masjarakat feodal dan djadjahan jang hingga kini masih banjak terdapat sisa²nja.

Kita mengetahui bahwa dalam masjarakat dimana feodalisme dan kolonialisme berkuasa maka penghisapan atas Rakjat banjak oleh segolongan ketjil manusia, dan perampasan atas hasil kerdja laki² dan wanita bagi kepentingan kaum feodal dan kaum pendjadjah telah menghambat dan membatasi perkembangan daja kreatif Rakjat banjak dan melenjapkan hak² azasi seseorang sebagai manusia.

Untuk mempertahankan diri kolonialisme tidak bisa tidak pasti menimbulkan diskriminasi antara manusia

dan manusia dan diskriminasi antara laki² dan wanita. Oleh karena itu kaum wanita menginsafi bahwa usaha² jang sungguh² kearah kemadjuan sosial tidak mungkin dapat dipisahkan dari perdjuangan jang gigih dan tekun untuk melenjapkan feodalisme dan kolonialisme, untuk kemerdekaan nasional jang penuh.

Revolusi nasional th. 1945 besar sekali artinja bagi wanita Indonesia baikpun dilihat dari sudut politis maupun dari sudut sosial. Revolusi nasional kita dengan sekaligus memberi kepada kaum wanita kedudukan jang baru, jang madju dibandingkan dengan waktu jang sudah². Hasil revolusi nasional th. 1945 jang langsung dapat dirasakan dan dialami oleh kaum wanita Indonesia ialah dilaksanakannja Undang² pemilihan Umum sehingga banjak sekali kaum wanita jang terpilih dan duduk sebagai wakil golongannja dalam Parlemen, Konstituante dan DPR² Daerah.

Akan tetapi kita pun maklum, bahwa adanja sisa² feodalisme dan kolonialisme ditanahair kita masih sangat mempersulit dan menghambat perkembangan dan kemadjuan wanita. Sisa² feodalisme dan kolonialisme masih tetap merintangi kesedjahteraan keluarga sebagai dasar utama masjarakat, bahkan seringkali kesedjahteraan keluarga hantjur sebagai akibat tjara penghisapan dan penindasannja. Kaum wanita dan anak² kita masih banjak jang menderita, baik materiil maupun spirituil karena berbagai tjara penghisapan baik jang langsung maupun jang tidak langsung.

Maka adalah suatu hal jang sewadjarnja, djika dalam Undang² Dasar Republik Indonesia ditjantumkan pasal² jang mendjamin kedudukan dan kesedjahteraan wanita serta kanak², warganegara Indonesia.

Pasal² dalam Undang² Dasar Sementara Republik Indonesia mengandung pengertian bahwa antara warga negara laki² dan wanita tidak diadakan perbedaan. Ketentuan ini sudah barang tentu memberi kedudukan jang menguntungkan kepada wanita Indonesia, lebih²

djika kita bandingkan dengan ketentuan² jang kita djumpai dalam peraturan² sewaktu pendudukan Djepang dan sewaktu pendjadjahan Belanda. Kita masih ingat pada tuntutan kaum wanita dan gerakan² wanita Indonesia sebelum revolusi, jang memperdjuangkan adanja hak memilih dan dipilih bagi wanita.

Kita ingat pada perdjuangan Ibu Kartini jang sampai wafatnja terus-menerus berdjuang setjara gagah berani dan konsekwen, untuk mendapatkan pengertian akan hak pendidikan dan peladjaran bagi kaum wanita.

Kita ingat pada perdjuangan almarhum Ibu Dewi Sartika, jang berusaha untuk mendapatkan pengakuan hak² ekonomi bagi wanita.

Kita ingat pada tuntutan² kaum wanita akan hak² jang sama dengan kaum laki² dalam politik, ekonomi, dan kebudajaan.

Dengan adanja ketentuan² dalam Undang² Dasar Sementara Republik Indonesia berarti bahwa tuntutan kaum wanita Indonesia mengenai hak sama dalam banjak hal telah terlaksana.

Oleh karena itu maka perlu dipertahankan adanja ketentuan² seperti jang tertjantum dalam Undang² Dasar Sementara Republik Indonesia untuk dimasukkan dalam Undang² Dasar jang akan datang. Jaitu bahwa segala sesuatu jang merupakan hak² dari pada warganegara berarti pula berlaku pada warganegara wanita. Untuk mendjamin terlaksananja hak jang tidak berbeda itu maka kami mengusulkan supaja ada suatu pasal jang chusus jang mentjantumkan ketentuan, bahwa hak sama dalam politik, ekonomi dan kebudajaan bagi wanita didjamin.

Hal ini sesuai dengan djiwa dari piagam hak azasi dari PBB, jang menjatakan bahwa pada pokoknja hak² manusia harus dilindungi oleh Undang², dan sesuai pula dengan isi dan djiwa dari Konvensi tentang Hak² Wanita jang antara lain mentjantumkan didalamnja pasal² sebagai berikut :

Pasal 1.

Wanita berhak untuk memilih disemua pemilihan dengan ketentuan jang sama dengan laki², dengan tiada suatu diskriminasi.

Pasal 2.

Wanita berhak dipilih dalam pemilihan untuk semua badan² jang terpilih setjara umum jang diatur oleh Undang² Nasional, dengan ketentuan jang sama dengan laki² dengan tiada suatu diskriminasi.

Pasal 3.

Wanita berhak mendjalankan pekerdjaan² jang umum, dan melaksanakan djabatan² umum, jang diatur oleh Undang² Nasional, dengan ketentuan jang sama dengan laki², dengan tiada suatu diskriminasi.

Dalam merealisasi pelaksanaan dari pada Konvensi tentang Hak² Wanita ini maka Sidang Dewan Sosial dan Ekonomi tentang Hak² Wanita dari PBB telah menelorkan beberapa resolusi antara lain mengenai :

1. **Hak² politik dari pada kaum wanita.**

   Mengandjurkan semua negara² anggota PBB dan anggota² dari Panitya² chusus jang belum mengakui Hak² Politik kaum wanita untuk berbuat demikian.

   Meminta organisasi² bukan Pemerintah dengan status konsultatief pada Dewan Ekonomi dan Sosial, untuk melandjutkan aktivitet mendukung hak² politik bagi kaum wanita, serta meminta supaja mereka mengadakan usaha² kearah perluasan dukungan umum diperbagai negeri untuk penandatanganan dan ratifikasi atau persetudjuan untuk Konvensi Hak² Politik Kaum Wanita.

   Mengandjurkan kepada negara² tersebut jang telah

diminta untuk menandatangani dan meratifiseer atau menjetudjui Konvensi Hak² Politik Kaum Wanita, dan jang belum melakukannja, untuk menandatangani dan meratifiseer atau menjetudjui Konvensi ini

2. **Perluasan pendidikan bagi wanita.**
3. **Upah jang sama bagi pekerdja jang sama.**
4. **Kedudukan wanita jang sudah kawin.**
5. **Kedudukan wanita dalam per-undang²an sipil.**

Kegiatan² dan usaha² setjara internasional ini mentjerminkan kepentingan daripada kaum wanita dan membuktikan perlunja ada ketentuan² jang kongkrit mengenai hak² wanita dalam Undang² Dasar kita.

Disamping adanja hak sama jang umum itu, perlu ada pasal² dalam Undang² Dasar serta hak sama bagi wanita dalam perkawinan. Untuk ini kami dapat mempergunakan djiwa dari pasal 16 dari piagam PBB mengenai hak² azazi manusia untuk dimasukkan dalam Undang² Dasar.

Pasal itu berbunji sebagai berikut :

Pasal 16.

1. Laki² dan wanita jang telah tjukup umur, dengan tiada pembatasan apapun berdasarkan bangsa, kebangsaan, (kewarga-negaraan) atau agama, berhak akan kawin dan membentuk keluarga. Mereka mempunjai hak jang sama terhadap hal² perkawinan, baik dalam waktu perkawinan maupun pada waktu pertjeraiannja.
2. Perkawinan hanja boleh dilangsungkan dengan persetudjuan jang bebas dan penuh dari tjalon suami istri.
3. Keluarga itu ialah kesatuan azasi jang berdasarkan kodrat dari masjarakat, dan berhak mendapat per-

lindungan oleh masjarakat dan negara.

Bahwa pasal² ini merupakan tuntutan jang hidup dalam masjarakat dapat kita lihat dari program kerdja dan tuntutan² dari gerakan² wanita di Indonesia.

Sebagai tjontoh kami dapat kemukakan bahwa konsep perkawinan jang diadjukan oleh P.B. Perwari didasarkan atas pasal 16 dari piagam PBB. Demikian pula dalam Kongresnja jang achir ini, Gerwani telah mengambil keputusan untuk mendesak supaja pasal 16 piagam PBB mengenai djaminan hak² wanita dimasukkan dalam Undang² Dasar Republik Indonesia. Pun Dewan Ekonomi dan Sosial dari PBB dalam sidangnja pada permulaan tahun jang lalu mengambil satu resolusi mengenai perkawinan jang isinja menjatakan dan menekankan supaja wanita dapat setjara bebas menjatakan pendiriannja tentang perkawinannja, sehingga tiada tekanan atau paksaan dalam perkawinan maupun pertjeraian.

Disamping wanita harus mempunjai hak² jang sama sebagai warga negara, maka sebagai Ibu jang harus melahirkan dan mengasuh anak² perlu mendapat hak perlindungan dan hak djaminan sosial jang chusus. Hal ini sesuai dengan pasal 25 dan pasal 26 piagam PBB jang berbunji sebagai berikut :

Pasal 25.

2. Kaum Ibu dan anak² berhak mendapat pendjagaan dan pertolongan jang istimewa.

Pasal 26.

3. Orang tua mempunjai hak istimewa untuk memilih djenis pengadjaran jang akan diberikan kepada anak²nja.

Hak² perlindungan dan djaminan sosial jang chusus itu dimaksudkan untuk mendjamin hak² bagi wanita jang bekerdja dan jang mengasuh anak². Bahwa hak² ini sudah sewadjarnja ditetapkan dalam Undang² Dasar dapat kami lihat dari kebutuhan daripada kaum wanita akan adanja perlindungan² tersebut sebagaimana ditjerminkan dalam Konferensi Solidaritet Asia-Afrika jang baru lalu jang diadakan di Kairo. Dalam Konferensi Asia-Afrika itu diantara resolusi² jang penting² ada resolusi mengenai kesedjahteraan wanita dan anak². Dalam resolusi itu dinjatakan bahwa memadjukan kesedjahteraan wanita dan anak² serta keluarga bagi satu keseluruhan adalah salah satu tanggung djawab penting daripada negara. Mengenai buruh wanita diandjurkan supaja kepada wanita pekerdja diberi hak untuk memperoleh perawatan kedokteran dengan pertjuma diwaktu hamil dan setelah melahirkan baji dan diberi libur jang lajak dengan menerima upah penuh.

Hak² kaum wanita jang bersuami harus diakui dan didjamin.

Harus diadakan Konvensi² dan peraturan² perburuhan internasional mengenai sjarat² pemakaian tenaga kerdja wanita, misalnja penetapan djam² kerdja, upah dan tundjangan², kerdja malam dan pekerdjaan dibawah tanah.

Hendaknja diberi perhatian istimewa kepada penegakan tempat² penitipan anak² kepunjaan wanita jang bekerdja.

Harus didirikan dan diperluas pusat² bersalin dan perawatan kanak² serta fasilitet² hiburan jang tjukup disegala bagian negeri, sebagai lembaga² jang sangat perlu untuk memperbaiki keadaan kesehatan.

Perlindungan kanak² terhadap keadaan² jang mungkin sekali akan mengakibatkan terlantarnja kanak², adalah urusan penting bagi negara. Hendaknja didirikan rumah² piatu, pusat² rehabilitasi dan lembaga² lain untuk memperbekal anak², jang malang nasibnja dan anak² jang menderita tjatjad supaja bisa mendjadi anggota² masjarakat jang produktif.

Pengadilan² kanak² dengan hakim² wanita dipandang perlu sekali bagi pendidikan kembali dan perlaku-

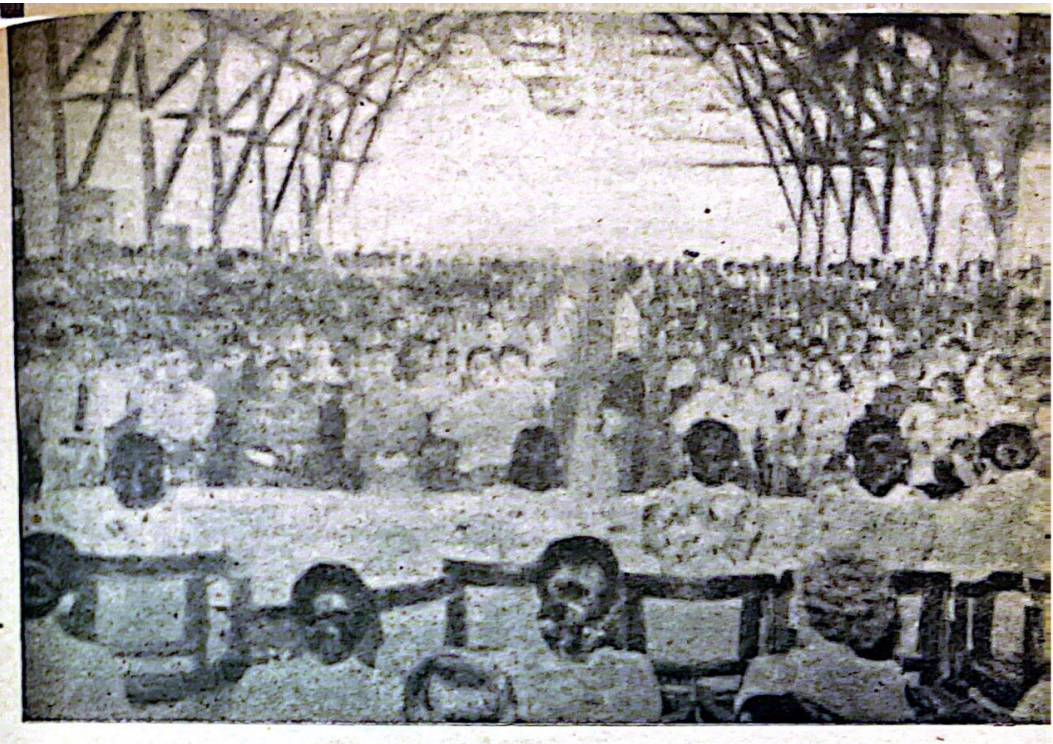
an terhadap para pelanggar hukum dibawah umur.

Resolusi² jang ditelorkan oleh Konfrensi Solidaritet Asia-Afrika itu merupakan djuga kebutuhan daripada kaum wanita dan anak² di Indonesia. Maka demi kepentingan dan kesedjahteraan Ibu dan anak² warga negara Indonesia, sudah sepatutnjalah djika kita mentjantumkan satu pasal jang isinja mendjamin perlindungan Ibu dan anak serta suatu pasal lagi jang mendjamin adanja djaminan sosial chusus bagi kaum wanita.

☆

Perbanjak klinik² pengobatan, biro² konsultasi wanita hamil, rumah² bersalin dan giatkan pemberantasan penjakit jang banjak terdapat dikalangan penduduk seperti malaria, trachoom, penjakit² kulit, tjatjing, tbc dll.

(fasal 46 *Program Tuntutan PKI*)



Partai mendidik para wanita Komunis mendjadi wanita² jang inteleknja, kemauannja dan perasaannja berkembang se-luas²nja dan se-dalam²nja, agar mereka tidak hanja dapat membeberkan kekurangan² masjarakat sekarang, tetapi djuga tahu menjinari semua problim perdjuangan wanita untuk emansipasi dan untuk Indonesia baru dan dunia baru dari semua segi, agar semua problim dapat dipetjahkan.

(D.N. Aidit)

Isi

Kata Pengantar 3

Diskriminasi dalam hak² politik perlu segera diachiri (nj. Mudigdio) 5

Undang² no. 68 tahun 1958 tentang Persetudjuan Konvensi Hak² Politik Kaum Wanita 13

Memori Pendjelasan Mengenai Usul Undang² tentang Persetudjuan Konvensi Hak² Politik Kaum Wanita 15

Konvensi Mengenai Hak² Politik Kaum Wanita 18

Soal Kepala Desa Wanita Buloh 22

Hak Azasi Warganegara dalam Undang² Dasar (nj. Setiati Surasto) 27

Hak² Wanita dan Anak² (nj. Amir Sjarifudin) 31